

**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMASYARAKATKAN
KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN
LUBUK PAKAM KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH

DESTI WULAN SARI

10.851.0018



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 4**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMASYARAKATKAN
KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN
LUBUK PAKAM KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH:

DESTI WULAN SARI

10.851.0018

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Juni 2014



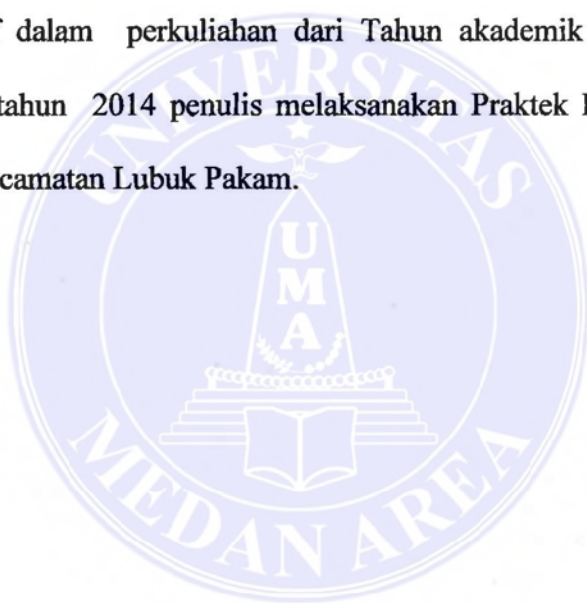
Desti Wulan Sari
10.851.0018

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 01 Desember 1980 dari ayah Jumarno dan ibu Seniwati. Penulis merupakan putri pertama dari empat bersaudara.

Tahun 1999 Penulis lulus dari SMK Dwi Karya Jaya dan pada tahun 2010 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulis aktif dalam perkuliahan dari Tahun akademik 2010-2011 s/d 2013-2014. Pada tahun 2014 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kecamatan Lubuk Pakam.



ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMASYARAKATKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG

OLEH :

Desti Wulan Sari

10.851.0018

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pesatnya kemajuan yang dicapai umat manusia di bidang teknologi dan ilmu pemerintahan serta lajunya pertumbuhan penduduk mengakibatkan eksploitasinya Sumber Daya Manusia yang berlebihan semangkin meningkatnya kebutuhan manusia dituntut akan pentingnya, kebersihan lingkungan agar meningkatkan kesehatan sesuai dengan tujuan pemerintah.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana peran pemerintah memasyarakatkan kebersihan lingkungan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa partisipasi pemerintah khususnya Kecamatan Lubuk Pakam dalam hal kebersihan diantaranya menyediakan pengangkut sampah, menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), petugas kebersihan begitu juga dengan masyarakat harus selalu bekerja sama dengan pemerintah dalam hal kebersihan, akan tetapi masyarakat hanya melakukan kewajiban-kewajiban membayar retribusi kepada pengangkut sampah dan kurangnya penyuluhan dan sosialisasi akan pentingnya kebersihan lingkungan maka dari itu pemerintah harus aktif kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dengan seringnya mengadakan penyuluhan dan gotong royong di lingkungan masing-masing agar terwujudnya kebersihan lingkungan untuk masa depan anak cucu kita nantinya.

**Kata Kunci : Kebersihan Lingkungan, Penyuluhan (Sosialisasi), Pemerintah/
Masyarakat**

ABSTRACT

PROMOTE THE ROLE OF GOVERNMENT IN ENVIRONMENTAL HYGIENE LUBUK PAKAM DISTRICTS DELI SERDANG

Oleh :

Desti Wulan Sari

10.851.0018

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Achieve rapid activity in human beings in the field of technology and science as well as the speed of population growth pemerintahan result in exploitation of human resources in the importance of demand, environmental hygiene in order to improve health in accordance with the government's objectives .

The problem is how the role of government proposed memasyarakatkan environmental cleanliness in the district Lubukpakam Deli Serdang

Results of research and discussion explaining that the government's participation in particular districts in terms of cleanliness Lubukpakam including providing trash hauler , providing landfills (TPS) , janitor as well as the community should always cooperate with the government in terms of hygiene , but people just do obligations - the obligation to pay a levy to the garbage and the lack of education and socialization of the importance of environmental hygiene and therefore the government must be active to the public on the importance of clean environment for the realization of each environmental hygiene for the future of our children and grandchildren will .

**Key Words : Environmental Hygiene, Education (Socialization), Government /
Comunnity**



DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----|
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 7 |
| 1.3. Pembatasan Masalah | 7 |
| 1.4. Perumusan Masalah | 7 |
| 1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II. LANDASAN TEORI | 9 |
| 2.1. Uraian Teori | 9 |
| 2.1.1. Pengertian Sampah..... | 9 |
| 2.1.2. Sistem Pengelolaan Sampah..... | 14 |
| 2.1.3. Aspek Teknik Operasional Pengelolaan Sampah... | 17 |
| 2.1.4. Dampak Jika Sampah Tidak Dikelola..... | 21 |
| 2.2. Kerangka Pemikiran | 23 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 28 |
| 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian | 28 |
| 3.2. Populasi dan Sampel | 28 |

| | |
|--|-----------|
| 3.3. Teknik Pengumpulan Data | 29 |
| 3.4. Definisi Operasional Variabel | 30 |
| 3.5. Analisis Data | 30 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 32 |
| 4.1. Hasil Penelitian | 32 |
| 4.1.1. Sejarah Singkat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang..... | 32 |
| 4.1.2. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Lubuk Pakam | 33 |
| 4.1.3. Demografi Kecamatan Lubuk Pakam | 35 |
| 4.1.4. Tugas dan Fungsi Kecamatan | 40 |
| 4.1.5. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas | 41 |
| 4.2. Pembahasan | 49 |
| 4.2.1. Peran Pemerintah Dalam Hal Memasyarakatkan Kebersihan..... | 49 |
| 4.2.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebersihan..... | 51 |
| 4.2.3. Pelaksanaan Penataan Lingkungan | 55 |
| 4.2.4. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan dan Penataan Lingkungan Hidup | 59 |
| 4.2.5. Target ADIPURA..... | 67 |

| | |
|---|-----------|
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 69 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 69 |
| 5.2. Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya kemajuan yang dicapai umat manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad modern ini, serta cepatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk dunia telah mengakibatkan dieksploitasinya sumber daya alam secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia yang begitu besar dan kompleks. Peningkatan kebutuhan hidup ini secara langsung menyebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi ini dalam jangka panjang akan menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah semakin meningkatnya volume sampah yang dihasilkan manusia.

Kondisi ini mengakibatkan terganggunya keseimbangan fungsi lingkungan kota. Hal ini tercermin dari timbulnya pencemaran udara dan pencemaran sungai, yang berasal dari kehidupan kota-kota tersebut.

Disisi lain dengan semakin meningkatnya peradaban manusia, tuntutan akan pentingnya kebersihan juga semakin besar. Hal ini tentu berkaitan dengan upaya manusia untuk meningkatkan derajat kesehatan sesuai dengan hakekat dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Salah satu unsur yang secara langsung terkait dengan kebersihan dan keindahan lingkungan adalah masalah sampah. Persoalan sampah inilah yang akhir-akhir ini menjadi fenomena aktual di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang

sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi: 1) sampah ada yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah yang berupa debu/abu; dan 4) sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya.

Berkaitan dengan permasalahan aktual yang dihadapi kota-kota di Indonesia termasuk Kota Lubuk Pakam, maka pengelolaan sampah menjadi bagian penting dari upaya menciptakan iklim kota yang kondusif. Seperti halnya kota-kota di Indonesia, Kota Lubuk Pakam pun tidak lepas dari masalah klasik yang berkaitan dengan sampah. Besarnya jumlah penduduk, keterbatasan lahan dan tingginya tingkat konsumsi mengakibatkan bertumpuknya sampah diberbagai sudut kota.

Menurut Sudrajat (2002 : 6), Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial, bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural, karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan, terutama di kota-kota besar seperti: Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang dan Medan. Menurut Prakiraan volume sampah yang dihasilkan per orang rata-rata 0,5 kg/kapita/hari.

Ditempat-tempat tertentu, khususnya di setiap pemukiman padat penduduk, hampir selalu ditemukan tumpukan sampah. Kondisi ini dapat ditemui antara lain wilayah Kecamatan Lubuk Pakam. Tumpukan sampah yang berserakan disekitar TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Aksara, menjadi

pemandangan yang kurang menyenangkan. Bahkan pada waktu-waktu tertentu tumpukan sampah tersebut dibiarkan berserakan di badan jalan. Akibatnya banyak pemakai jalan yang merasa terganggu dengan kondisi jalan yang kotor, becek dan bau.

Meskipun tersedia tempat pembuangan sementara, tetap saja sampah yang dihasilkan masyarakat melebihi kapasitas yang tersedia. Hal ini disebabkan karena proses pembuangan sampah dari TPS ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan sering terlambat. Akibatnya sampah yang tidak tertampung di TPS menumpuk dan berserakan ke tempat-tempat sekitarnya. Selain menimbulkan bau tidak enak, sampah yang berserakan tersebut juga menyebabkan lingkungan sekitarnya terkesan menjadi kumuh, sehingga mengganggu pemandangan.

Fenomena lebih serius dapat dilihat di pasar-pasar di Kecamatan Lubuk Pakam. Berdasarkan pengamatan sementara di sekitar Pasar, sampah yang dihasilkan para pedagang hanya dibuang sembarangan di sekitar tempat mereka berdagang. Mereka sama sekali tidak menyediakan tempat khusus sebagai penampungan sampah sementara di kios mereka. Akibatnya lorong/jalan yang digunakan untuk berbelanja menjadi kotor oleh daun-daunan, buah-buahan, plastik, kertas pembungkus dan sebagainya. Yang lebih parah lagi, sampah-sampah tersebut kadang-kadang bercampur dengan air bekas mencuci ikan atau daging yang dibuang sembarangan. Akibatnya lorong pasar menjadi becek dan bau. Hal ini tentu mengakibatkan kenyamanan masyarakat yang berbelanja menjadi kurang nyaman.

Selain itu depan pasar juga sering ditemukan tumpukan sampah yang

berserakan sampai ke trotoar dan badan jalan. Berdasarkan pengamatan sementara hal ini disebabkan karena keterlambatan pengangkutan sampah dari TPS yang hal ini disebabkan karena keterlambatan pengangkutan sampah dari TPS yang tersedia di pasar yang bersangkutan ke TPA terdekat.

Fenomena lainnya adalah masih sering dijumpai sampah yang berserakan disekitar trotoar dan badan jalan-jalan umum di Kecamatan Lubuk Pakam. Sampah tersebut selain berasal dari pengguna jalan/pejalan kaki, juga berasal dari pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar dan sebagian badan jalan sebagai tempat usaha mereka. Sampah yang berserakan di pinggir-pinggir jalan protokol tersebut tidak saja mengganggu pemandangan para pejalan kaki dan pengendara, namun lebih dari itu juga dapat mencoreng citra Kota Lubuk Pakam sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah memacu kemampuan untuk mengelola sampah dengan baik dan benar berdasarkan pengetahuan yang relative minim. Namun hal belum seperti yang diharapkan, dimana niat baik pemerintah itu masih jauh dari memadai bila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis. Bahkan pada umumnya penanganan sampah ini masih terkesan sesuatu yang *business as usual* dan rutinitas semata yang memandang sampah sebagai barang buangan yang menjijikkan sehingga penanganannya dipahami hanya sebatas urusan memindahkan, membuang, dan memusnahkan dengan cara yang sangat tidak aman dan cenderung mencemari lingkungan.

Dari kacamata pemerintahan, kerap kali pengelolaan sampah dipahami sangat sektoral yakni hanya dikelola oleh Dinas Kebersihan semata dan

berorientasi keproyekan, yakni masalah sampah menjadi dasar dan alasan Dinas berwenang untuk memunculkan usulan-usulan proyek seputar pengelolaan sampah. Hal ini kerap diperparah oleh suatu pemahaman bahwa pengelolaan sampah hanya sebatas pada bagaimana menarik dana sebanyak mungkin dari retribusi sampah. Di lain pihak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar retribusi amat minim. Misalnya keluhan lamban dalam pengumpulan sampah, TPS dibiarkan berserakan, diangkut dengan truk yang bercecerana dan sebagainya. Padahal dalam pengelolaan sampah tidak hanya murni ekonomi dan bersifat komersial (*profit motive*) tetapi juga menghadirkan aspek pelayanan umum (*public service*) yang merupakan tanggung jawab pemerintah/instansi publik. Dengan demikian ada kejelasan tanggung jawab sosial (*social responsibility*), tanggung jawab hukum (*liability*), dan terpenuhinya kewajiban adanya akuntabilitas publik (*public accountability*).

Berbagai fenomena di atas menunjukkan bahwa penanganan sampah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat belum berjalan dengan efektif. Sebagai institusi yang memegang mandat menangani masalah kebersihan kota, Dinas Kebersihan Kabupaten Deli Serdang dituntut untuk bekerja lebih serius. Fenomena di atas bisa menjadi gambaran bahwa masalah sampah merupakan masalah serius yang harus segera ditangani oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Deli Serdang. Sebagai institusi pelayanan masyarakat Dinas Kebersihan Kabupaten Deli Serdang dituntut untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

Berdasarkan kenyataan ini dapat diketahui bahwa persoalan penanganan persampahan tidaklah mudah, melibatkan banyak pelaku, memerlukan teknologi,

membutuhkan dana (fasilitas) yang cukup dan memerlukan keinginan yang kuat untuk melaksanakannya, termasuk kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk berperan dalam menjaga kebersihan di lingkungannya terutama sekali yang berkaitan dengan sampah yang dirasakan masih rendah. Tantangan dan permasalahan inilah yang menjadi beban bagi Pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam yang perlu dicari pemecahannya, sehingga peranan masyarakat dan pemerintah dapat terlaksana berhasil guna dan berdaya guna dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya pelayanan di bidang kebersihan, sekaligus juga mewujudkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi “Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi”.

Pada sisi yang lain hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak masyarakat. Hak ini menurut Heinghard dalam Hardjasoemantri (2002:93) bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang memunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah penanganan sampah di Kecamatan Lubuk Pakam dalam skripsi yang berjudul: **“Peran Pemerintah Dalam Memasyarakatkan**

Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang”.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan dan menjaga kebersihan.
2. Peran pemerintah kurang terkoordinasi dalam penanggulangan kebersihan.
3. Efektivitas sosialisasi kebersihan yang dilakukan pemerintah kurang mendapat respon masyarakat.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Peran pemerintah kecamatan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan.
2. Pengelolaan kebersihan tersebut ditujukan dalam pencapaian adipura.
3. Lokasi penelitian pada Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Perumusan Masalah

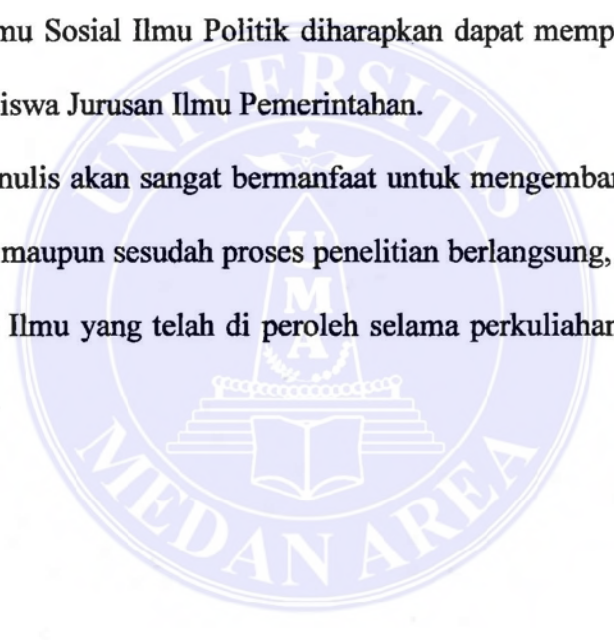
Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas maka dapat disebutkan persoalan yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam dalam memasyarakatkan kebersihan lingkungan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang”

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam dalam memasyarakatkan kebersihan lingkungan kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak Kantor Camat Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan kebersihan.
2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik diharapkan dapat memperkaya ragam penelitian Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan.
3. Bagi Peneliti/penulis akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang ada selama maupun sesudah proses penelitian berlangsung, bahkan dapat mengaplikasikan Ilmu yang telah di peroleh selama perkuliahan pada tempat kerja mendatang.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Sampah

Yang dimaksud dengan sampah menurut Notoatmodjo (2007:187):

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.

Para ahli kesehatan masyarakat Amerika Membuat batasan, sampah (waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya. (Notoatmodjo, 2007:188).

Kaleka (2010:1) mengemukakan bahwa :

Rumah tangga merupakan penghasil sampah terbesar. Hampir setiap kegiatan rumah tangga selalu menghasilkan sampah. Misalnya seorang ibu yang memasak, ia menyelesaikan potongan sayuran yang tidak ikut dimasak. Ini merupakan material sisa yang dipandang sebagai barang yang tidak berguna lagi sehingga cepat-cepat disingkirkan dari dapur atau tempat tinggal. Sampah itu dibuang di tempat sampah, di sungai, atau di lahan kosong.

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terdiri atas:

1. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial,

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

3. Sampah spesifik meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana.
 - d. Puing bongkaran bangunan.
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik. (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah).

Ditinjau dari dasar dan sifatnya sampah dapat dibagi dalam 4 kategori,

yaitu :

1. Sampah yang mudah membusuk
2. Sampah yang tidak mudah membusuk
3. Sampah yang mudah terbakar
4. Sampah yang tidak mudah terbakar

Mengenai keempat macam sampah yang telah dikemukakan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sampah yang mudah membusuk

Sampah jenis ini terdiri dari sisa-sisa potongan hewan, sayur-sayuran atau buah-buahan dan makanan lainnya. Sampah ini berasal dari tempat-tempat permukiman, restoran, rumah sakit, pasar dan lain sebagainya.

2. Sampah yang tidak mudah membusuk

Sampah jenis ini merupakan bahan-bahan yang berasal dari sisa proses industri seperti kaca dan bahan-bahan yang terbuat dari logam. Sampah ini biasanya berasal dari rumah tangga dan perkantoran serta pabrik-pabrik.

3. Sampah yang mudah terbakar

Sampah jenis ini adalah sampah kering yang terdiri dari kertas, plastik, karet

dan kayu-kayuan yang mudah terbakar.

4. Sampah yang tidak mudah terbakar

Sampah jenis ini pada umumnya terdiri dari kaca, kaleng, serta logam atau besi-besi.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu bahwa sampah mempunyai pengaruh terhadap usaha-usaha dalam meningkatkan kebersihan dan keindahan. Sampah sebagai benda atau bahan yang tidak dipakai lagi harus dibuang atau dimusnahkan, karena dapat berpengaruh buruk terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian jelaslah bahwa sampah tersebut perlu diusahakan sedemikian rupa sehingga keadaan kota kelihatan bersih dan indah sekaligus akan menciptakan lingkungan yang sehat.

Sebaliknya apabila sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan pula keadaan suatu daerah menjadi kotor dan akan membawa penyakit, serta dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan terjadinya banjir.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sampah dalam hubungan dengan kebersihan dan keindahan sangat tergantung dengan cara pengelolaannya.

Dengan demikian usaha untuk meningkatkan kebersihan bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah semata-mata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Begitu juga dengan usaha meningkatkan kebersihan dan keindahan berbagai tempat lainnya seperti pertokoan, pasar-pasar serta tempat-tempat rekreasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Basriyanta (2007:18) berdasarkan asalnya, sampah padat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Sampah organik.

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan sampah organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (Selain kertas, karet dan plastik, tepung, sayuran, kulit buah, daun kering dan ranting).

2. Sampah anorganik.

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikro organisme secara keseluruhan. Sementara sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama.

Penggolongan jenis sampah juga dapat didasarkan pada sifat atau komposisi kimianya, mudah tidaknya terbakar, dan karakteristiknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya, sampah dibagi menjadi :
 - a. Sampah bersifat organik, misalnya sisa sayuran, daun-daunan dan buah-buahan
 - b. sampah bersifat anorganik, diantaranya kaleng bekas, abu dan pecahan gelas.
2. Berdasarkan dapat tidaknya sampah terbakar, sampah dibagi menjadi :

- a. Sampah mudah terbakar, misalnya sampah kertas, kain, plastik, kayu dan karet.
 - b. Sampah tidak mudah terbakar, misalnya sampah kaca, logam, kaleng, potongan besi. Sampah jenis ini mempunyai rantai ikatan kimiawi yang panjang, sehingga sukar terurai dan terbakar serta dapat mengakibatkan sanitasi lingkungan menjadi buruk, mengurangi keindahan dan kenyamanan lingkungan serta terganggunya keseimbangan ekologi serta sumber daya alam.
3. Berdasarkan dapat tidaknya membusuk, sampah dibagi menjadi :
- a. Sampah yang sukar membusuk, misalnya plastik, karet, kaleng, abu.
 - b. Sampah yang mudah membusuk, misalnya daging, sisa-sisa makanan, buah-buahan dan lainnya.
4. Berdasarkan karakteristiknya, sampah terdiri dari :
- a. Sampah basah, yaitu sampah yang dihasilkan dalam proses pengolahan makanan. Jenis sampah ini terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayuran dari pengolahan.
 - b. Sampah kering, yaitu sampah kering yang terdiri dari sampah yang berasal dari rumah penduduk, pusat perdagangan, kantor, misalnya kertas karbon, kardus, plastik, sobekan kain, dan lain-lain.
 - c. Sampah abu
Yaitu sisa-sisa pembakaran zat-zat yang mudah terbakar, baik dirumah, kantor maupun industri.
 - b. Binatang mati
Yaitu sampah biologi berupa bangkai-bangkai binatang yang mati karena

bencana alam, penyakit atau kecelakaan.

c. Sampah dari pembersihan jalan

Yaitu sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas, daun-daunan dan lainnya.

d. Sampah industri

Yaitu sampah yang terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri, pengolahan hasil bumi dan industri lainnya

e. Sampah khusus

Yaitu termasuk sampah yang memerlukan penanganan khusus dalam pengolahannya misalnya kaleng cat, film bekas, radio aktif, zat teknik dan lain-lain.

f. Rongsokan kendaraan.

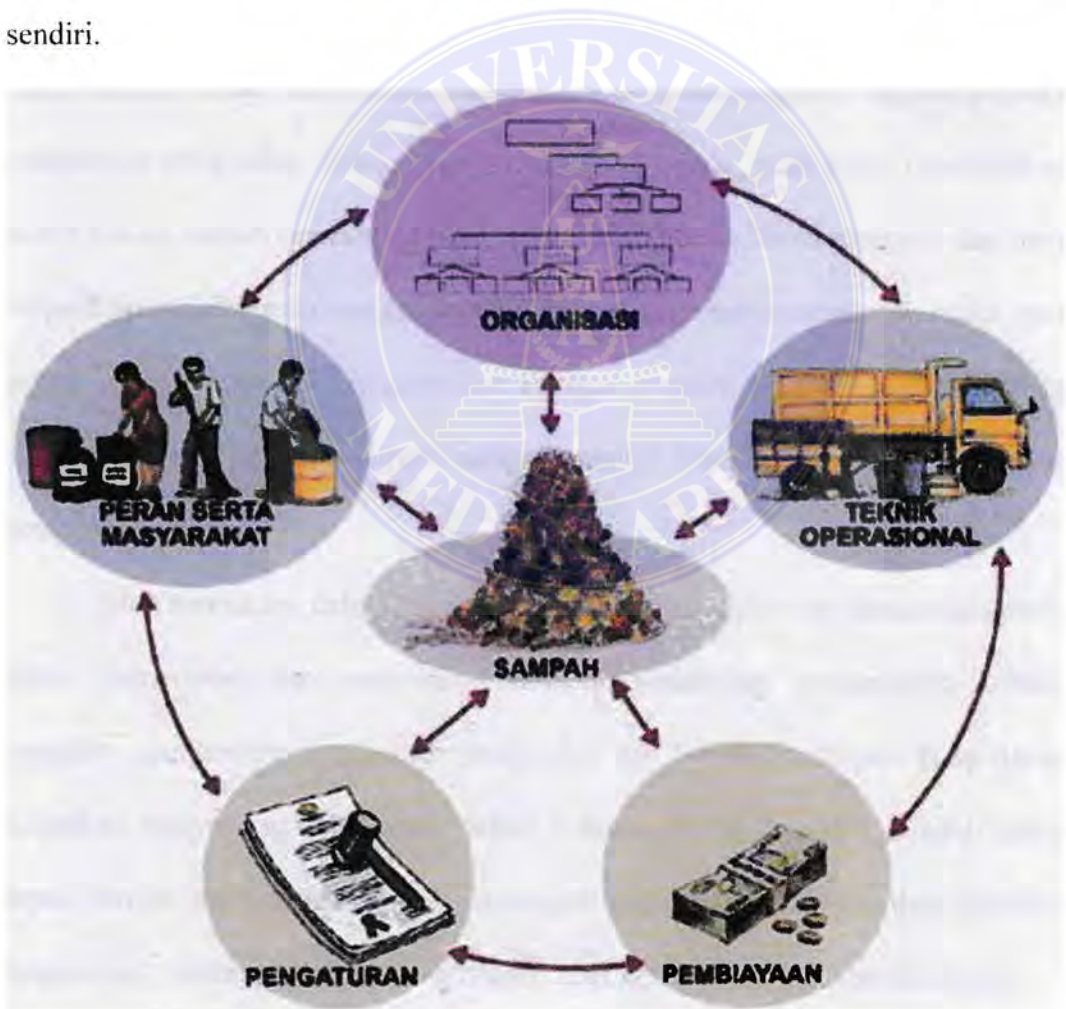
Yaitu sampah yang terdiri dari kendaraan bekas milik umum dan pribadi dan suku cadang kendaraan bekas seperti ban mobil, becak dan lain-lain.

2.1.2. Sistem Pengelolaan Sampah

Notoarmodjo (2003:168) menjelaskan bahwa sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dari sampah-sampah tersebut akan hidup berbagai mikro organisme penyebab penyakit, dan juga binatang serangga sebagai pemindah/penyebarkan penyakit. Oleh karena itu sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat.

Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang

meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Dept. Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002). Kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat. Kelima aspek tersebut diatas ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut ini. Dari gambar tersebut terlihat bahwa dalam sistem pengelolaan sampah antara aspek teknis operasional, organisasi, hukum, pembiayaan dan peran serta masyarakat saling terkait, tidak dapat berdiri sendiri.



Gambar 1
Skema Manajemen Pengelolaan Sampah
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, (SNI 19-2454-2002))

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

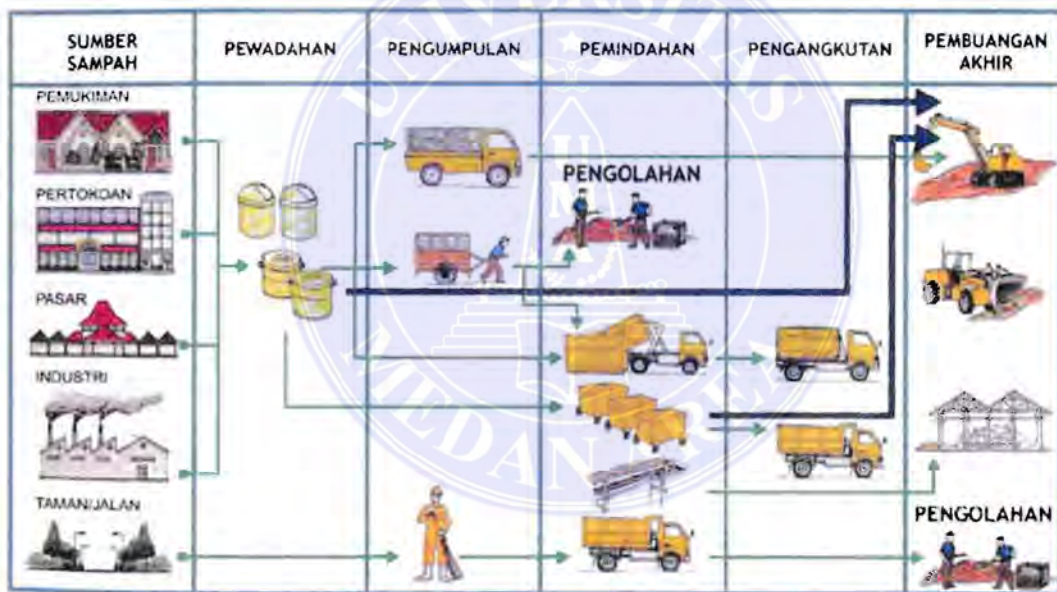
Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi perantara menyebarkan suatu penyakit. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah.

Adapun usaha pengelolaan sampah menurut Slamet (2009:32) baik skala besar maupun skala kecil, apabila sudah tercapai tujuannya, yakni lingkungan dan masyarakat yang sehat, maka faktor yang paling utama, yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah peran serta masyarakat. Masyarakat harus mengerti dan mau berpartisipasi, bila perlu mengubah sikap sehingga bersedia membantu mulai dari pengurangan volume sampah sampai perbaikan kualitas sampah, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan tempat sampah, sampai kepada penyediaan lahan dan pemusnahan sampah.

Oleh karena itu, dalam menanggulangi sampah sudah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dengan melakukan pengelolaan sebaik mungkin agar tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat pemerintah dalam menanggulangi masalah sampah yaitu dapat berupa memperbanyak tempat-tempat sampah yang besar dan dikelola dengan baik, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.

2.1.3. Aspek Teknik Operasional Pengelolaan Sampah

Aspek Teknis Operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan obyek persampahan. Perencanaan system persampahan memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan.



Gambar 2
 Teknis Operasional Pengelolaan Sampah
 (Sumber: Standar Nasional Indonesia(SNI 19-2454-2002))

Aspek Teknik Operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan.

1. Penampungan sampah

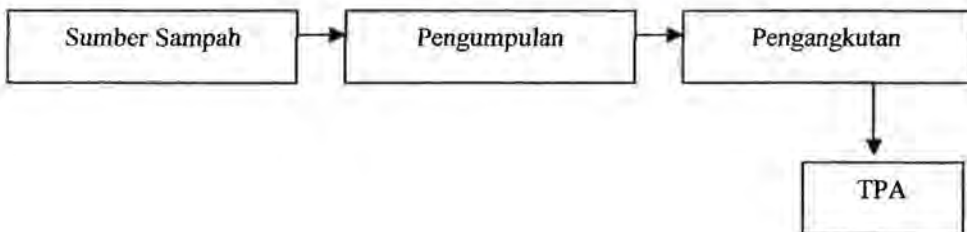
Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. . Faktor yang paling mempengaruhi efektivitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan (SNI 19-2454-2002).

2. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) yaitu pola individual dan pola komunal (SNI 19-2454-2002) sebagai berikut :

a. Pola Individual

Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/ TPS sebelum dibuang ke TPA.

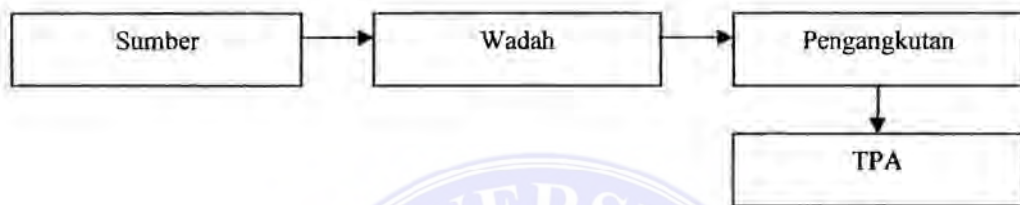


Gambar 3

Pola Pengumpulan Sampah Individual Tak Langsung
Sumber: SNI 19-2454-2002

b. Pola Komunal

Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan / ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.



Gambar 4
Pola Pengumpulan Sampah Komunal
Sumber: SNI 19-2454-2002

3. Pemindahan sampah

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut dan atau ram dan atau kantor, bengkel (SNI 19-2454-2002). Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan jangan sampai sampah tersebut bercampur kembali.

4. Pengangkutan sampah

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah

ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4 kali lipat.

Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang biasanya jauh dari kawasan perkotaan dan permukiman.

5. Pembuangan akhir sampah

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 metode yaitu :

a. Metode *Open Dumping*

Merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang/ menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada perlakuan khusus/ pengolahan sehingga sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

b. Metode *Controlled Landfill* (Penimbunan terkendali)

Controlled Landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang

dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

c. Metode *Sanitary landfill* (Lahan Urug Saniter)

Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

2.1.4. Dampak Jika Sampah Tidak Dikelola

Menurut Purwendro dan Nurhidayat (2010:5) menjelaskan sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, atau aktivitas manusia lainnya. Bahkan sampah bisa berasal dari puing-puing bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor.

Jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, yaitu:

1. Dampak terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:

- a. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum.
- b. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).
- c. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya

adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

- d. Sampah beracun: Telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa (Hg). Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator.

2. Dampak terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah (lindi) yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis.

Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak.

3. Dampak terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat: bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.
- b. Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.
- c. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan

secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).

- d. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.
- e. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Jika sarana penampungan sampah yang kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.

Meskipun sampah membawa dampak yang pada dasarnya tidak baik apabila dikelola secara tidak baik pula Tetapi sebaliknya apabila dikelola sampah juga bisa bermanfaat. Menurut Sofian (2010:2) sampah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, asalkan mau memilahnya antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan dan terurai menjadi menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau. Sementara itu sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa mengalami pelapukan.

2.2. Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan (Dinas Pendidikan Nasional, 2003:242) adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan pada dasarnya terbentuk oleh ide untuk menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri. Pada proses pemberdayaan, salah satu penekanannya adalah pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada

masyarakat, agar individu di dalam masyarakat menjadi lebih berdaya. Dengan kata lain, proses pemberdayaan masyarakat sering disebut dengan istilah *peran serta masyarakat* atau populer dengan istilah Pembangunan Bertumpu Kepada Masyarakat (*Community Based Development*).

Istilah peran serta sering juga disebut dengan partisipasi. Partisipasi tersebut secara umum mempunyai pengertian sebagai suatu usaha berkelanjutan, yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan, baik secara aktif maupun pasif.

Ada banyak alasan yang dapat diberikan untuk menyertakan masyarakat dalam kebijakan. Salah satunya adalah realita bahwa permasalahan yang ada di dalam masyarakat saat ini berkembang secara cepat, dinamis, dan semakin bervariasi serta rumit, sehingga tanpa keterlibatan masyarakat maupun pihak-pihak diluar pemerintah, maka akan menyulitkan pemerintah sendiri bila bersikeras untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat seorang diri.

Dengan berkembangnya kompleksitas, keterkaitan dan kepastian isu-isu, serta kecepatan perubahan dari situasi, mengandalkan banyak orang dan kelompok sudah barang tentu akan membantu dalam mencapai sebuah pandangan yang seimbang terhadap suatu isu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi penting. Di samping itu, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam penentuan kebijakan publik.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Untuk menciptakan *clean environmental*

management dan *good environmental governance*, menuntut persyaratannya adanya keterbukaan, kesetaraan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta akuntabilitas.

Lahirnya pemikiran pembangunan partisipasi dilatarbelakangi oleh program, proyek dan kegiatan pembangunan masyarakat yang datang dari atas atau dari luar komunitas. Kenyataan konsep pembangunan ini sering gagal dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Karena itu dilakukan reorientasi terhadap strategi pembangunan masyarakat yang lebih mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan seperangkat teknik-teknik yang dapat menciptakan kondisi adanya pemberdayaan masyarakat melalui proses pembangunan masyarakat secara partisipatif.

Kaitan partisipasi dengan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik tetapi juga dalam proses sosial hubungan antar kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam memobilisasi sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan, dan lain-lain.
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian - bagian daerah ataupun golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditinggalkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif

mereka melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu.

Masyarakat hendaknya perlu dilibatkan dalam tiap proses pembangunan, yang meliputi:

1. Identifikasi permasalahan, dimana masyarakat bersama perencana ataupun pemegang otoritas kebijakan tersebut mengidentifikasi persoalan dalam diskusi kelompok, identifikasi peluang, potensi dan hambatan
2. Proses perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana dan strategi dengan berdasarkan pada hasil identifikasi.
3. Pelaksanaan proyek pembangunan, dimana masyarakat merupakan pelaku dalam pembagunan
4. Evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan, apakah pembangunan memberikan hasil guna ataukah justru masyarakat dirugikan dengan proses yang dilakukan, merupakan inti dari proses evaluasi ini
5. Mitigasi, yakni kelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus mengurangi dampak negatif pembangunan
6. Monitoring, tahap yang dilakukan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan. Dalam tahap ini juga dimungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan situasi dan informasi terakhir dari program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Partisipasi bukanlah proses yang seragam, namun lebih merupakan suatu rangkaian pendekatan yang meliputi bentuk dan cara seperti:

1. Berbagi informasi : informasi searah kepada masyarakat, misalnya tentang suatu penyampaian kebijakan pemerintah atau sosialisasi peraturan pemerintah

melalui surat kabar, majalah, brosur, selebaran, poster, tayangan radio, televisi, dan lain-lain.

2. **Konsultasi atau dialog:** informasi dua arah diantara pemerintah dan masyarakat, misalnya evaluasi partisipatoris terhadap suatu proyek atau kegiatan di suatu daerah, pertemuan-pertemuan / rapat-rapat konsultatif, penilaian warga terhadap manfaat yang mereka terima dari suatu proyek atau kegiatan, kunjungan ke lapangan, wawancara terhadap warga suatu kelurahan/desa untuk mengetahui secara langsung manfaat suatu kegiatan.
3. **Kerjasama :** berbagi peran/tugas dalam proses pengambilan keputusan; perencanaan partisipatoris, lokakarya untuk menetapkan peran dan prioritas kerja para *stakeholders* mencakup kepanitian bersama, pembentukan gugus; pembagian tugas dan tanggung jawab dalam implementasi proyek atau aktivitas; serta mengadakan berbagai pertemuan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan melakukan evaluasi bersama atas rancangan kebijakan dan revisi kebijakan.
4. **Pemberdayaan :** Pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua aspek, yaitu *to give authority to* dan *to give ability to or enable*. Berdasarkan kedua aspek ini, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan/wewenang dalam pengambilan keputusan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Kedua, pemberdayaan bermakna upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini akan dijabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian, menghubungkan satu variabel atau kondisi dengan variabel atau kondisi lainnya dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif *explanatory*. Penelitian *explanatory* merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungannya antara satu variabel dengan yang lain.

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Waktu Penelitian dilakukan pada akhir Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Maret 2014.

3.2. Populasi dan Sampel

Secara lebih formal, pengambilan sampel terdiri atas pilihan elemen dari populasi. "Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realita sosial) yang ingin diketahui". (Erickson dan Nozamechuk, 2001:156).

Sedangkan sampel, dikatakan oleh Sudjana (2006:167) "Adapun bagian

yang diambil dari populasi disebut sampel. Sampel-sampel itu harus representatif dalam arti segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dimiliki. Kekeliruan penarikan dapat terjadi karena kurang cermat memahami populasi.

Dalam penelitian ini, peneliti harus mengetahui/memahami realita yang diteliti serta jumlah dari populasi yang diteliti. Selanjutnya dapat disebutkan dalam penelitian ini sesuai dengan judulnya yang menjadi populasi adalah seluruh pelaksana kegiatan organisasi di Kantor Camat Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Sedangkan sampel yang diajukan adalah sebanyak 10 orang pelaksana kegiatan organisasi di Kantor Camat Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis memakai cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan sebagai usaha mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Dalam penelitian lapangan ini guna memperoleh data atau informasi dimana penulis langsung terjun ke lapangan dengan pokok permasalahan, dengan jalan mengadakan : Interview (wawancara).

3.4. Definisi Operasional Variabel

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan dua variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan. Kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut :

Variabel bebas (Independent Variable) atau disebut juga dengan variabel yang diselidiki pengaruhnya.

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini “Pemerintah Kecamatan“, dengan indikatornya :

1. Unsur pengambil keputusan
2. Unsur pelaksana

Variabel terikat (Dependent Variable) atau disebut juga dengan variabel ramalan, yakni variabel yang diramalkan akan timbul sebagai akibat pengaruh variabel bebas. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah “Kebersihan lingkungan“, dengan indikatornya :

1. Hasil kerja
2. Pencapaian Target Adipura

3.5. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini adalah tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data, serta gejala-gejala yang ada.

Metode analisis data ini berpedoman pada wawancara yang dilakukan sewaktu penelitian dilakukan. Temuan dari suatu wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut akan diperbandingkan dengan apa yang telah diteorikan kemudian

dicari kesimpulannya. Dimana selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan dan kemudian diberikan masukan-masukan kepada instansi terkait.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat khususnya masyarakat perkotaan dalam bidang kebersihan pada dasarnya merupakan partisipasi pasif dimana masyarakat menganggap perbuatan-perbuatan melakukan kewajiban membayar retribusi sampah adalah suatu sistem partisipasi yang dapat mendukung program kebersihan yang dijalankan oleh pemerintah.
2. Tingkat partisipasi masyarakat perkotaan dalam bentuk gotong royong di bidang kebersihan semakin berkurang nilainya. Hal ini disebabkan tingkat kehidupan kota yang lebih mementingkan sisi efisiensi waktu dan individualistis.
3. Permasalahan kebersihan bukan semata-mata permasalahan pengelolaan sampah tetapi mencakup hal yang lebih luas lagi yaitu permasalahan lingkungan. Sedangkan permasalahan lingkungan tidak hanya mencakupi permasalahan sekeliling semata tetapi mencakup hal ikhwal yang terjadi pada suatu lingkungan tertentu serta perubahan-perubahan dari lingkungan itu sendiri.
4. Perihal rusaknya lingkungan hidup bukan hanya semata-mata perihal tercemarnya udara, air maupun rusaknya hutan, tetapi juga meliputi permasalahan kependudukan, yaitu efek-efek dari aktivitas industri maupun teknologi, seperti urbanisasi, perilaku, kriminalitas, sosial budaya dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basriyanta, 2007, *Memanen Sampah*, Yogyakarta: Kanisus.
- Dinas Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Erickson B.H. dan Nosamchuk, T.A. 2001, *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kaleka, Norbertus, 2010, *Kompos Dari Sampah Keluarga*, Surakarta: Delta Media.
- Notoatmodjo, Soekijo, 2007, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2003, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwendro, Setyo dan Nurhidayat, 2010, *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Slamet, Juli Soemirat, 2009, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soefian, 2010, *Sukses Membuat Kompos Dari Sampah*, Jakarta: Agro Media Pustaka.
- Sudjana, 2006, *Statistika*, Tarsito, Bandung.
- Sudrajat, 2006, *Mengelola Sampah Kota*, Jakarta: Penebar Swadaya.